

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang. Oleh Chatrin Putri Kiuk. NIM: 22310220.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang? dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang?

Tujuan penelitian Adalah Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang dan Untuk Mengetahui Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan Jenis penelitian normatif.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : Variabel Terikat dan Variabel Bebas. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi pembangun gedung Dukcapil Kota Kupang . Sedangkan Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang dan Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu: 1. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang, yaitu Majelis hakim pengadilan tinggi menganggap putusan hakim pengadilan negeri kurang setimpal, Majelis hakim pengadilan tinggi kupang mempertimbangkan perma 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan, Terdapat peran signifikan dari jabatan sebagai ppk (pejabat pembuat komitmen), 2. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang yaitu: Terdakwa ditahan, Terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.151.557.500,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa di jatuhi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah),Terdakwa di bebaskan membayar Biaya perkara sebesar 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Saran dari penulis: Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus meningkatkan pengawasan teknis dan administratif secara ketat terhadap progres pekerjaan di lapangan guna menghindari keterlambatan ekstrem yang berpotensi merugikan keuangan negara, termasuk bersikap tegas dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika penyedia jasa terbukti wanprestasi.

Kata Kunci : Penyalagunaan Jabatan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Description of Law Enforcement Against Perpetrators of Corruption in the Construction of the Kupang City Dukcapil Building. By Chatrin Putri Kiuk. NIM: 22310220.

The problems raised in this research are: Why did the High Court Judges change the length of the sentence for the perpetrators of the corruption crime in the construction of the Kupang City Dukcapil building? and what are the legal consequences for the perpetrators of the corruption crime in the construction of the Kupang City Dukcapil building?

The research objectives are to determine the reasons why the High Court Judges changed the length of the sentence for the perpetrators of corruption in the construction of the Kupang City Dukcapil building and to identify the legal consequences for the perpetrators of the corruption crime in the construction of the Kupang City Dukcapil building. This research is descriptive and utilizes a normative research type.

This study uses two variables, namely: the Dependent Variable and the Independent Variable. The Dependent Variable in this study is the Judge's Decision regarding the corruption crime in the construction of the Kupang City Dukcapil building. Meanwhile, the Independent Variables in this study are knowing the reasons why the High Court Judges changed the length of the sentence and identifying the legal consequences for the perpetrators.

Based on the results of the research conducted by the author, the conclusions obtained are as follows: 1. The reasons why the High Court Judges changed the length of the sentence for the perpetrators of corruption in the construction of the Kupang City Dukcapil building are: the High Court panel of judges considered the District Court's verdict to be inadequate; the Kupang High Court panel of judges considered Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines; and there was a significant role played by the defendant's position as a Commitment Making Officer (PPK). 2. The legal consequences for the perpetrators of the corruption crime in the construction of the Kupang City Dukcapil building are: the defendant is detained; the defendant is sentenced to 2 years and 6 months in prison; the defendant must pay restitution in the amount of Rp1,151,557,500.00 (one billion one hundred and fifty-one million five hundred and fifty-seven thousand five hundred rupiah); the defendant is fined Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah); and the defendant is ordered to pay court costs of Rp5,000.00 (five thousand rupiah).

Author's Suggestions: To Commitment Making Officers (PPK): Every PPK must increase strict technical and administrative supervision over the progress of work in the field to avoid extreme delays that have the potential to cause state financial losses, including being firm in carrying out Termination of Employment (PHK) if the service provider is proven to have committed a breach of contract (wanprestasi).

Keywords: Abuse Of Office Corruption Crimes

